



**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta 55213 Telp 512820 / 512688



---

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

***Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

***Salam Indonesia Raya***

Yang terhormat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Yang kami terhormat, Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya.  
Yang kami hormati, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Yang kami hormati, Anggota DPRD DIY  
Yang kami hormati, Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemda DIY  
Yang kami hormati, rekan-rekan pers dan media massa lainnya  
beserta para hadirin sekalian

Pertama tama kami sampaikan Puja dan Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD D.I Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afiat.

Kepada Pimpinan Rapat Paripurna kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra

### **Hadirin yang kami muliakan**

Perubahan dan perkembangan jaman mengenai layanan jasa umum yang disediakan pemerintah daerah D.I Yogyakarta tentu mengalami perubahan dan kebutuhan untuk penyesuaian terhadap harga barang dan jasa. Peningkatan layanan jasa umum juga dikarenakan nilai inflasi dan beberapa faktor lain yang berpengaruh.

Fraksi Partai Gerindra melihat bahwa penyesuaian layanan jasa umum perlu dilakukan, khususnya tarif layanan yang digunakan untuk peningkatan layanan jasa umum kepada para penggunanya. Fraksi Partai Gerindra sepatutnya dalam konteks peninjauan kembali layanan jasa umum sebagai bentuk-bentuk penyesuaian dan peningkatan jasa layanan.

### **Hadirin yang kami muliakan**

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Gerindra tentang rancangan perubahan peraturan daerah retribusi jasa umum. Atas perhatiannya kami haturkan banyak terimakasih.

**Yogyakarta, 17 Januari 2019**

**Fraksi Partai Gerindra**

**DPRD DIY**

**SUROYO**

**KETUA FRAKSI PARTAI GERINDRA**

**ANTON PRABU SEMENDAWAI SH, MKn**

**SEKRETARIS FRAKSI**



**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta 55213 Telp 512820 / 512688



---

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

***Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

***Salam Indonesia Raya***

Yang terhormat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Yang kami terhormat, Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya.  
Yang kami hormati, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Yang kami hormati, Anggota DPRD DIY  
Yang kami hormati, Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemda DIY  
Yang kami hormati, rekan-rekan pers dan media massa lainnya  
beserta para hadirin sekalian

Pertama tama kami sampaikan Puja dan Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD D.I Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afiat.

Kepada Pimpinan Rapat Paripurna kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra

**Hadirin yang kami muliakan.**

Potensi pendapatan daerah, khususnya dari berbagai bentuk usaha perlu diatur dengan baik dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tentu saja berbagai pendapatan tersebut membutuhkan pengelolaan yang baik dan akuntable untuk menyumbangkan PAD secara maksimal. Dalam berbagai kasus di D.I Yogyakarta, khususnya jasa retribusi parkir selalu menimbulkan persoalan karena pengelola menerapkan tarif sekehendak hati tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Komplain dari masyarakat sering terjadi di media sosial. Meskipun demikian berbagai retribusi diluar platform harga yang ditetapkan masih sering terjadi.

Fraksi Partai Gerindra sepakat untuk dilakukannya perubahan-perubahan tarif retribusi jasa umum mengingat banyak perkembangan yang terjadi, khususnya adanya inflasi ataupun penyesuaian terhadap harga-harga dan pertumbuhan obyek baru.

**Hadirin yang kami muliakan.**

Demikian pandangan umum terhadap perubahan ketiga peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. Atas perhatiannya kami haturkan banyak terimakasih.

**Yogyakarta, 17 Januari 2019**

**Fraksi Partai Gerindra**

**DPRD DIY**

**SUROYO**

**KETUA FRAKSI PARTAI GERINDRA**

**ANTON PRABU SEMENDAWAI SH, MKn**

**SEKRETARIS FRAKSI**



**FRAKSI PARTAI GERINDRA**  
**DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta 55213 Telp 512820 / 5120



---

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 – 2039**

***Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

***Salam Indonesia Raya***

Yang terhormat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Yang kami terhormat, Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya.  
Yang kami hormati, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Yang kami hormati, Anggota DPRD DIY  
Yang kami hormati, Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemda DIY  
Yang kami hormati, rekan-rekan pers dan media massa lainnya  
beserta para hadirin sekalian

Pertama tama kami sampaikan Puja dan Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD D.I Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afiat.

Kepada Pimpinan Rapat Paripurna kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra

### **Hadirin yang kami muliakan.**

Kemajuan pembangunan di D.I Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir telah mencapai perkembangan pesat. Tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik, pada program-program lainnya juga mengalami perkembangan pesat. Dinamika pertumbuhan sosial ekonomi D.I Yogyakarta terus berkembang dan menuntut perubahan kebijakan daerah, khususnya perubahan tata ruang dan wilayah untuk menyesuaikan perkembangan jaman.

Penataan ruang wilayah D.I Yogyakarta mempunyai tujuan mewujudkan D.I Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang D.I Yogyakarta, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan. Penjabaran yang dimaksud dalam tiga sektor tersebut, khususnya pendidikan, budaya dan pariwisata tentu mendapatkan bagian utama dalam konteks penataan tata ruang wilayah.

Melihat konteks tata ruang wilayah tentu saja harus dikorelasikan dengan potensi sumberdaya yang dimiliki pada masing-masing keruangan, dimana potensi tersebut dapat dimaksimalkan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat D.I Yogyakarta.

### **Hadirin yang kami muliakan.**

Fraksi Partai Gerindra melihat upaya pemerintah daerah D.I Yogyakarta dalam membangun tata ruang wilayah tersebut cukup baik, dimana dalam tujuan utama dengan tema pendidikan, budaya dan pariwisata bisa dioptimalkan sesuai dengan tema-tema Keistimewaan Yogyakarta.

Dari sisi pemanfaatan keruangan, tema-tema lainnya seperti pengoptimalan pengembangan kawasan dan peruntukannya sudah cukup baik dengan rencana pemanfaatan terintegrasi untuk semua sektor. Mulai dari

pengembangan kawasan perkotaan baru, pengembangan infrastruktur transportasi, hingga penciptaan kawasan-kawasan potensial ekonomi lintas sektoral. Fraksi Partai Gerindra melihat bahwa dokumen rencana tata ruang wilayah tersebut secara umum cukup baik dalam mengantisipasi perkembangan pembangunan D.I Yogyakarta dalam kurun 5 tahun kedepan.

Beberapa pertanyaan yang kami ajukan adalah sebagai berikut :

1. D.I Yogyakarta mempunyai persoalan angka kemiskinan dan disparitas ekonomi yang tinggi. Selain itu kesenjangan infrastruktur pembangunan perkotaan dan pedesaan yang timpang. Tentu saja koneksitas kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen rencana tata ruang wilayah D.I Yogyakarta kurun 5 tahun mendatang juga diproyeksikan untuk mengatasi ketiga masalah tersebut.

**Pertanyaannya** adalah: bagaimana pemerintah daerah D.I Yogyakarta menempatkan persoalan persoalan kemiskinan, disparitas ekonomi dan ketimpangan infrastruktur daerah tersebut dalam dokumen rencana tata ruang wilayah?

2. Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah tentu ada skala prioritas seperti pada tema pendidikan, budaya dan pariwisata. Fraksi Partai Gerindra melihat bahwa 3 tema besar tersebut telah mendapatkan porsi utama dan cukup baik dalam kebijakan rencana tata ruang wilayah. Di sisi lain, Fraksi Partai Gerindra melihat bahwa produktivitas masyarakat D.I Yogyakarta dalam tema pengembangan industri baik besar, menengah maupun kecil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menurun. Menurut kami, sektor industr tersebut mampu mendongkrak produktivitas masyarakat D.I Yogyakarta dan mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, khususnya pengangguran terbuka dan angkatan kerja baru.

**Pertanyaannya** adalah bagaimana strategi pemerintah daerah D.I Yogyakarta dalam mendorong sektor industri real dalam konteks rencana tata ruang wilayah tersebut untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat?

3. Mengenai isu lingkungan, khususnya konservasi tanah dan air selalu menjadi persoalan sepanjang tahun. Peralihan lahan produktif pertanian menjadi peruntukan lainnya menjadikan ketahanan pangan di D.I Yogyakarta selalu menurun karena produktivitas dan kualitas pangan terus menurun. Persoalan ini belum ditambah dengan bencana alam lokal yang bisa terjadi setiap saat. Di sisi lain, maraknya pembangunan mall dan hotel secara signifikan menurunkan permukaan air tanah, khususnya wilayah perkotaan dan sekitarnya.

**Pertanyaannya** adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah D.I Yogyakarta dalam rencana tata ruang wilayah dalam pengendalian perubahan peruntukan lahan untuk melindungi program dan kawasan konservasi air dan tanah untuk mempertahankan kualitas dan keberlanjutan lingkungann untuk generasi mendatang?

**Hadirin yang kami muliakan.**

Fraksi Partai Gerindra melihat bahwa dokumen rencana tata ruang wilayah sangat penting bagi pedoman kebijakan pembangunan daerah ataupun kawasan yang telah ditentukan. Dengan dasar kebijakan fungsi keruangan tersebut, maka acuan fungsi kawasan dalam kebijakan pembangunan daerah menjadi penting dan menjadi pedoman kebijakan pembangunan daerah untuk keberlanjutannya. Harapan kami, dokumen rencana tata ruang wilayah tersebut mampu mendorong kesejahteraan masyarakat sesuai dengan fungsi kawasan dan keruangannya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

**Yogyakarta, 17 Januari 2019**  
**Fraksi Partai Gerindra**  
**DPRD DIY**



**SUROYO**

**KETUA FRAKSI PARTAI GERINDRA**

**ANTON PRABU SEMENDAWAI SH, MKn**

**SEKRETARIS FRAKSI**